

Indriyanto Seno Adji Ucapkan Sumpah sebagai Dewas KPK

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah jabatan oleh Indriyanto Seno Adji, sebagai Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menggantikan posisi Artidjo Alkotsar yang telah meninggal dunia.

Pengucapan sumpah Indriyanto dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73B Tahun 2021.

"Demi Allah saya bersumpah dengan sesungguhnya, bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuai apapun kepada siapapun juga," ucap Indriyanto.

Dari penelusuran, Indriyanto Seno Adji tercatat pernah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Plt. Pimpinan KPK

pada 18 Februari 2018 bersama Taufiqurrahman Ruki dan Johan Budi SP. Pria kelahiran Jakarta, 11 November 1957 itu juga tercatat menjadi Guru Besar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan Agung RI.

Putra dari Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 1974-1982, Oemar Seno Adji juga termasuk dalam 15 calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan panitia seleksi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2008 silam. Indriyanto sempat meneruskan kantor advokat milik ayahnya tersebut.

Dari rekam jejak sebagai advokat, lulusan Hukum Universitas Indonesia (UI) ini ternyata tercatat pernah menjadi Pengacara atau kuasa Hukum dari Presiden kedua RI, Soeharto saat mantan pemimpin Orde Baru itu melawan Majalah Time. Saat itu, Indriyanto tak sendiri, ia menjadi pembela mendiang Presiden Soeharto bersama Juan Felix Tampubolon, OC Kaligis, Mohamad Assegaf, dan Denny Kailimang. ● mei

Kejagung Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

JAKARTA (IM) - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi terkait perkara dugaan korupsi di PT Asabri, Rabu (28/4).

Kedua saksi tersebut adalah DH selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Wanaartha Life dan BH selaku Kepala Grup Hukum BNI (Persero) Tbk.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya.

Sampai saat ini sudah 9 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di

antaranya Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation. Kemudian mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam R Damiri dan Sonny Widjaja, BE selaku Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014, HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019. Lalu IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017, Heru Hidayat selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, dan LP sebagai Direktur Utama PT Prima Jaringan.

Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun. Saat ini penyidik Kejagung Agung sudah mulai melaksanakan proses klarifikasi penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ● mei



IDN/ANTARA

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA KOTA BANJARMASIN

Warga menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 16, Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (28/4). KPU Kota Banjarmasin melaksanakan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tiga kelurahan di Banjarmasin Selatan setelah ditemukannya pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020.

Dewas KPK Periksa Pelanggaran Kode Etik Penyidik Stepanus Robin Pekan Ini

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan salah satu penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan, pihaknya mulai mengumpulkan berbagai fakta tentang pelanggaran etik yang dilakukan penyidik asal Polri tersebut.

"Dewas juga sejak terungkap minggu lalu tentang kasus penyidik tersebut, sudah bekerja mengumpulkan fakta tentang pelanggaran etiknya," ujar Tumpak dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4).

Meski tidak merinci tanggal pasti dimulainya pemeriksaan, namun Tumpak mengaku pemeriksaan akan berlangsung pekan ini.

"Minggu ini akan dilanjutkan dengan memulai

pemeriksaan-pemeriksaan. Tidak perlu lah kapan perdana pemeriksaan akan dilakukan, disampaikan. Yang penting kami Dewas tahu wewenang dan tugas kami," tuturnya.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Stepanus Robin Pattuju, Wali Kota Tanjungbalai M Syahril dan seorang pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap terkait penyelidikan KPK atas dugaan korupsi di pemerintahan Tanjungbalai Sumatera Utara 2020-2021.

Ketua KPK Firi Bahuri menyebut Stepanus Robin meminta M Syahril untuk membayar uang Rp 1,5 miliar dengan janji akan menutup kasus yang tengah diselidiki KPK itu. Kasus tersebut juga menyeret nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang diduga menjadi fasilitator pertemuan antara Stepanus Robin dan M Syahril. ● han

PENGUMUMAN

Dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 26-04-2021 dan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 28-04-2021 nomor 36 dibuat dihadapan Ny. SUSANNA TANU, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan Terbatas PT SETRINDO PERKASA berkedudukan di Jakarta Utara telah dibubarkan/dilikuidasi terhitung sejak tanggal 28-04-2021.

Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi likuidator dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman ini.

Jakarta, 29 April 2021
Likuidator
PT Setrindo Perkasa

2 Polhukam

IDN/ANTARA



JUSUF KALLA LANTIK KETUA DMI GORONTALO

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat Jusuf Kalla (kanan) melantik ketua dan pengurus DMI Provinsi Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Rabu (28/4). Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut resmi melantik Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Ketua DMI Provinsi Gorontalo.

Pelabelan KKB sebagai Teroris, Moeldoko: Masih Dikaji Seksama

Pemerintah diminta menindak tegas KKB Papua yang selama ini menebar teror terhadap masyarakat. Namun tindak tegas harus tetap sesuai dengan HAM.

JAKARTA (IM) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut

wacana pengklasifikasian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi teroris,

masih dalam kajian.

Moeldoko mengatakan, kajian akan dilakukan secara mendalam dan amat hati-hati.

"Persoalan julukan kita lagi kaji ya, lagi kaji dengan seksama nanti ditunggu saja seperti apa nantinya," tutur Moeldoko dalam sebuah webinar, Rabu (28/4).

Panglima TNI Mutasi Ratusan Jenderal dari 3 Matra, TNI AD, TNI AL dan TNI AU

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali memutasi jabatan perwira tinggi dari tiga matra yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Terdapat 151 pati yang dimutasi, rincian-nya adalah 81 Pati TNI AD, 46 Pati TNI AL dan 24 Pati TNI AU.

Mutasi dan rotasi jabatan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/350/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Mutasi dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis," kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto, Rabu (28/4).

Sementara matra TNI AD, pati yang dimutasi antara lain Mayjen TNI Tiopan Aritonang dari Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI menjadi Dankodiktal TNI. Posisi Tiopan selanjutnya akan diisi Mayjen TNI Syafruddin yang sekarang menjabat Kas Kobwilhan I.

Sementara Mayjen TNI Tri Martono dari Wakil Komandan Sesko TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI. Posisinya akan digantikan Mayjen TNI Handy Geniardi yang saat ini menjabat Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI. Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad juga mendapatkan penugasan baru.

Dia dipindah sebagai Waka Bais TNI. Adapun penggantian yakni Brigjen TNI Prantara Santosa yang sekarang menjabat Kapusjarah TNI. ● mei

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Hadir di Sidang Juliari untuk Beri Dukungan

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/4). "Sebagai pertemanan, sebagai temanlah, teman lama ya, satu partai dengan saya ya di PDI-Perjuangan, beliau sama-sama pembalap. Beliau jadi Ketum PB IMI. Kedekatan beliau dengan saya sangat dekat," katanya.

Prasetyo mengaku belum bertemu secara langsung dengan Juliari Peter Batubara. Ia pun berharap agar persidangan Juliari Batubara dapat berjalan dengan objektif. "Belum. Belum (bertemu). Saya masuk beliau sudah di depan. (Harapannya) ya supaya objektif lah," pungkasnya.

Sekadar informasi, Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap Rp32 miliar

lebih dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.

Uang sebesar Rp32 miliar itu diduga diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Adapun, rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari Konsultan Hukum, Harry Van Sidabukke, senilai Rp1,28 miliar. ● han

Menurut Moeldoko, pentingnya dilakukan kajian secara mendalam agar peberikan antara ketegasan dan penegakkan hak asasi manusia (HAM) dapat terlaksana dengan baik. Baginya, penghormatan terhadap HAM tak boleh luput dalam penyidikan kasus ini.

"Intinya di situ adalah bagaimana metelakkan antara ketegasan dengan penghormatan terhadap HAM. Kita tidak boleh mengabaikan tentang itu," katanya.

Namun, menurut mantan Panglima TNI itu, tindakan yang tegas untuk meredam aksi KKB juga diperlukan. Sebab selama ini tindakan KKB sudah menimbulkan ketakutan bagi masyarakat dan menimbulkan situasi tak aman di Papua.

"Buktinya kan ada pembunuhan guru, pembunuhan masyarakat asli, pembakaran

sekolah dan lain-lain," ungkapnya.

Selain itu, penanganan KKB yang terukur juga ditekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI dan Kapolri, saat sidang kabinet beberapa waktu lalu.

"Persoalan KKB harus ditangani secara terukur, secara proporsional dengan pendekatan-pendekatan hukum," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, KKB masih terus melancarkan aksinya untuk menebar teror. Terkini, kontak tembak TNI-Polri dengan KKB kembali pecah di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa 27 April 2021.

Dalam kontak tembak ini, sebanyak 9 KKB dinyatakan tewas. Sementara satu personel Brimob gugur setelah terkena timah panas kelompok separatis di Papua tersebut. ● han

Rekening Isi Rp3,4 M Diblokir, Perias Pengantin Gugat Kemenkeu

SEMARANG (IM) - Seorang perias pengantin asal Boyolali menggugat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak bank tempatnya menyimpan uang. Hal ini dilakukan karena rekeningnya yang berisi Rp 3,4 miliar diblokir sehingga dia mengaku terpaksa berutang.

Perias pengantin bernama Siti Bariyah (25) ini juga mengaku memiliki usaha penjualan beras. Siti bercerita uang tersebut itu dia dapat dari hasil usaha dan warisan yang tersebar di 4 rekening. Namun, pada 22 Februari lalu, Siti mengaku tak bisa mengakses rekening tersebut.

"Hari Senin (22/2) mau ambil uang sudah tidak bisa. Saya tanyakan pimpinan bank kok ini nggak bisa ambil uang. Katanya dari regulator, kita nggak tahu regulator apa," kata Siti saat ditemui di kantor Law Firm Yosep Parera, Semarang Indah, Kota Semarang, Rabu (28/4).

Kemudian pada Kamis (25/2), Siti diperiksa oleh Dirjen Bea Cukai terkait kasus kakak iparnya yang berinisial BK yang dihukum karena tidak membayar cukai rokok. Kala itu, Siti turut diperiksa karena diduga terlibat dalam unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus BK.

"Diperiksa itu tanggal 25 Februari, ditanyain masalah mulai dari saya kerja apa sampai kenapa ada uang sebanyak itu. Itu uang warisan keluarga, sama hasil saya kerja, totalnya ada sekitar Rp 3,4 miliar. Tapi tetap tidak dibuka sampai sekarang, sidang kemarin (22/4) saya cek juga belum bisa," urainya.

PENGUMUMAN

-Dengan ini diumumkan bahwa PT AVARTE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Diluar Rapat) tertanggal dua puluh enam April tahun dua ribu dua puluh satu (26-04-2021), Nomor 13, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH.,LL.M., Notaris di Kota Bogor, yang memutuskan:

-Perubahan/Penurunan Modal Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

-Apabila terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas tindakan Perseroan tersebut dapat mengajukan surat secara tertulis pada Kantor Perseroan.

TTD
Direktur Perseroan

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini mengumumkan telah dilaksanakannya pengambilalihan/akuisisi sejumlah 7.040.000 (tujuh juta empat puluh ribu) saham PT. M&S Apparel, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan"), oleh Tuan Woo Byoung Jun dan Nyonya Kang Sin Sook, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor.

Bogor, 29 April 2021

Tuan Woo Byoung Jun PT. M & S Apparel
Nyonya Kang Sin Sook Direksi & Dewan Komisaris



IDN/ANTARA

SIDANG JULIARI BATUBARA

Terdakwa korupsi bansos se-Jabodetabek tahun 2020 Juliari Batubara bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/4). Agenda sidang dengan terdakwa mantan Menteri Sosial tersebut adalah mendengarkan keterangan saksi.